

Prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi  
Padang, 26-27 November 2013

# KOMUNIKASI @2014

Komunikasi dan Pemilihan Umum 2014 :  
Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa Depan

ISBN 978-602-14699-0-3

Diselenggarakan oleh :



Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

Didukung oleh :

**KOMPAS**



PROSIDING  
SEMINAR BESAR NASIONAL KOMUNIKASI

**KOMUNIKASI @2014**

Komunikasi dan Pemilu 2014 :  
Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa  
Depan

Diterbitkan oleh :



Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia

**Prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi**

**KOMUNIKASI @2014**

**Komunikasi dan Pemilu 2014 : Persiapan, Pelaksanaan dan Masa Depan  
Padang, 26-27 November 2013**

**Tim Reviewer :**

**Dr. Endah Murwani, M.Si**

**Dr. Irwansyah, M.A**

**Dr. Mulharnetti Syas, M.Si**

**Dr. Eni Maryani, MSi**

**Dr. Eko Harry Susanto, MSi**

**Sri Hastjarjo, S.Sos, Ph.D**

**Editor :**

**Dr. Endah Murwani, M.Si**

**Dr. Rajab Ritonga, M.Si**

**Ade Kadarisman, S.Sos, MT**

**Diterbitkan oleh :**

**Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia**

**Jl. Raya Boulevard Blok CB no 1 Kelapa Gading**

**Jakarta Utara 14250**

**ISBN : 978-602-14699-0-3**

# KOMUNIKASI @ 2014 : DASAR PEMIKIRAN

## ***MENGAPA 2014?***

Tahun 2014 merupakan pusat perhatian kehidupan nasional dewasa ini. Hampir semua media dan kegiatan komunikasi di semua bidang – politik, ekonomi, hukum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, bahkan hiburan – hampir tidak bisa sama sekali melepaskan diri dari keterkaitan (paling tidak pengkait-kaitan) dengan langkah-langkah menghadapi Pemilihan Umum 2014. Peristiwa ini bukan saja dilihat sebagai penentuan orang-orang yang akan menjadi presiden dan legislator untuk lima tahun (2014 - 2019). Namun lebih jauh lagi : apakah akan dapat meletakkan dasar perubahan (transformasi) yang kuat bagi masa depan tanpa segala kekurangan, kegagalan, ketidakadilan, dan kepentingan yang terjadi selama ini.

## ***MENGAPA KOMUNIKASI?***

Pertarungan untuk memenangi ke dua lembaga tertinggi negara itu sudah dirasakan secara sengit sejak jauh hari, dengan mempergunakan segala cara dalam komunikasi. Baik yang terbuka atau tertutup, adu argumen atau kegiatan, pencitraan positif maupun perusakan citra, berbagai macam ragam jajak pendapat, baik yang representatif, manipulatif, ataupun yang misinterpretatif. Bagaimanapun, tidak ada strategi ataupun langkah taktis dalam kegiatan pemilu, yang tidak mengandalkan tindakan komunikasi, termasuk kesengajaan untuk tidak berkomunikasi pada saat tertentu. Oleh karena itu, seluruh manusia komunikasi Indonesia - baik yang ilmuwan, peneliti, pengamat, pengajar, analis, perencana, praktisi atau pelaksana, di kalangan khalayak ataupun di media, dan sebagainya - sangat berminat mengikuti perkembangan 2014 ini dengan seksama.

Minat itu meningkat dalam menghadapi 2014 ini, mengingat dinamika perkembangan dunia komunikasi yang sangat pesat, dipacu percepatan teknologi yang terus menerus.

**Tema pokok** dari Seminar Nasional ini adalah **Komunikasi dan Pemilihan Umum 2014: Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa Depan**. Inti paparan adalah masalah strategis komunikasi yang potensial dapat terjadi terkait dengan pemilu (baik yang kini telah dapat diamati, hal yang dapat terjadi dan perlu diawasi atau “didahului” dengan langkah pencegahan, maupun dampak positif untuk masa depan yang perlu menjadi perhatian). Tema pokok ini dijabarkan dalam 4 sub tema sbb :

### **1) Komunikasi & Pendapat Umum**

Membahas perkembangan teori pendapat umum dan pengaruhnya dalam proses demokrasi seperti Pemilu, termasuk teknik, metodologi yang dipergunakan, *quick count*, *electability/popularity*. Juga implikasi dan pengaruhnya terhadap pemilih yang sesungguhnya; etik dari penyelenggara survey, dsb. Sub-topik ini penting karena di Indonesia telah dianggap sebagai keharusan dan kebenaran, sehingga ada organisasi polling yang bertindak sebagai konsultan untuk memenangi Pemilu.

### **2) Komunikasi & Issue Krusial.**

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam Pemilu di sebuah negara demokrasi seharusnya adalah sikap, pendirian atau komitmen seorang calon terhadap suatu *issue*. Sikap inilah yang dapat meyakinkan pemilih bahwa calon akan betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat jika menang Pemilu. Apa lagi jika tidak ada acuan yang harus dilakukan, seperti GBHN atau Platform yang diputuskan bersama. Padahal banyak masalah berat yang sekarang muncul karena tidak ada komitmen dan pendirian calon, antara lain soal korupsi (misal hukuman pencabutan hak politik, dsb.), pengaturan rokok, impor pangan, soal etnisitas dan keyakinan beragama, perda syariah, rokok dan kesehatan, konsentrasi kepemilikan televisi, hak perempuan dan anak, dsb.,

**3) Komunikasi & Kepemimpinan**

Bagaimana proses pembentukan kepemimpinan melalui komunikasi ? Benarkah pencitraan kepada publik (seperti iklan, poster, dsb.) dapat membentuk pemimpin yang pantas dipilih? Percayakah publik kepada pencitraan seperti itu, tanpa rekam jejak prestasi yang sesungguhnya ? Apa yang dapat dijadikan acuan bagi pemilih yang selama ini tidak mengenal calon, apa lagi Capres yang tinggal di pusat dan tidak pernah turun ke bawah? Apa peranan dari berbagai mekanisme yang dibuat untuk menjadikan seorang “pemimpin” patut dipilih, seperti Konvensi, Rapat Kerja Nasional, dsb? Apa kriteria orang yang pantas jadi Presiden ? Kampanye anti calon, sering menonjolkan kekurangan seorang calon yang tidak disukai; apakah ini efektif ?

**4) Komunikasi Media & Pengaruh (Media Massa vs. Media Sosial).**

Akhir-akhir ini banyak pendapat, bahwa yang menentukan keputusan memilih oleh para pemilih adalah pengaruh media yang sangat besar. Dengan luasnya penggunaan teknologi baru (handphone, Ipad, tablets, laptop, dsb.) muncul pula Media Baru dan Media Sosial (Facebook, Twitter). Media yang mana yang sebenarnya lebih berpengaruh ? Khusus media massa: koran, TV, media daerah ? Bagaimana pula etik komunikasi dan aturan Pemilu bagi calon yang menjadi pemilik media sehingga dapat memonopoli informasi ?

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga prosiding Seminar Besar Nasional Komunikasi dengan tema “Komunikasi dan Pemilu 2014 : Persiapan, Pelaksanaan, dan Masa Depan” dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) ke 30 dan kongres ke VI ISKI dapat diterbitkan.

Tujuan diselenggarakan Seminar Besar Nasional Komunikasi adalah 1) membahas, menguji serta memaparkan berbagai permasalahan komunikasi nasional Indonesia yang berhubungan dengan Pemilihan Umum 2014; dan 2) mengemukakan segi-segi yang perlu diperhatikan serta diperbaiki, agar Pemilu 2014 dapat terlaksana sebaik-baiknya demi kepentingan Bangsa. Ini adalah kesempatan yang luar biasa dan langka untuk meningkatkan dan menguji kemampuan, serta memperdalam ilmu pengetahuan komunikasi yang membumi dalam konteks Indonesia. Seminar yang diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI) dirancang khusus guna mawadahi keperluan tersebut.

Prosiding ini merupakan sumbangan insan komunikasi bagi Indonesia. Pemaparan topik/tema dan permasalahan komunikasi nasional Indonesia yang dibahas dalam Seminar Besar Nasional Komunikasi mempunyai relevansi yang tinggi untuk diteruskan kepada berbagai pihak yang berwewenang dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan Seminar Besar Nasional Komunikasi dan penerbitan prosiding ini. Kami berharap kegiatan dan prosiding ini memberikan manfaat bagi masyarakat komunikasi Indonesia.

Jakarta, 13 November 2013  
Panitia Seminar Besar Nasional Komunikasi

# DAFTAR ISI

|   |        |
|---|--------|
| <b>KOMUNIKASI DAN KEPEMIMPINAN @2014</b>  | HAL 19 |
| <b>KOMUNIKASI BERBASIS MODAL SOSIAL :<br/>MENISCAYAKAN KEPEMIMPINAN INDONESIA<br/>MASA DEPAN</b><br>Wisnu Widjanarko      | HAL 21 |
| <b>TANTANGAN DAN KARAKTER PEMIMPIN 2014</b><br>Dwi Purbaningrum   | HAL 28 |
| <b>KOMUNIKASI POLITIK PEMIMPIN MASA DEPAN<br/>YANG BERKARAKTER</b><br>Suraya  | HAL 34 |
| <b>RAGAM KOMUNIKASI POLITIK “NJAWANI”<br/>MENJELANG PEMILU 2014</b><br>Dr. Bertha Sri Eko M, Dr. Titi Widaningsih         | HAL 41 |
| <b>KEPEMIMPINAN DI ERA DIGITAL MENUJU<br/>MASYARAKAT MADANI</b><br>Sri Sedyaningsih                                       | HAL 50 |
| <b>KOMUNIKASI, PENCITRAAN,<br/>DAN KEPEMIMPINAN @2014</b><br>Dr Nur Kholisah  | HAL 57 |
| <b>KOMUNIKASI, KEPEMIMPINAN DAN POLITIK<br/>KEKERABATAN DALAM PERSPEKTIF<br/>BIROKRASI IDEAL</b><br>Dr Ani Yuningsih,M.Si | HAL 64 |
| <b>PEMIMPIN, KOMUNIKASI POLITIK DAN<br/>PENGARUH SOSIAL MEDIA</b><br>Indiwan Seto Wahyu Wibowo                            | HAL 71 |
| <b>GAYA KOMUNIKASI PEMIMPIN</b><br>Djudjur Luciana Radjagukguk S.Sos.,M.Si  | HAL 79 |
| <b>QUO VADIS KOMUNIKASI KEPRESIDENAN ?</b><br>Doddy Salman  | HAL 86 |



|  |         |
|--|---------|
| <b>GAYA KOMUNIKASI JOKOWI SEBAGAI<br/>PEMIMPIN INDONESIA</b>   | HAL 92  |
| HH.Daniel Tamburian,S.Sos.,M.Si  |         |
| <b>PEMILIH PEMULA, MEDIA SOSIAL, DAN PEMIMPIN<br/>LOW POWER DISTANCE</b>   | HAL 99  |
| Yugih Setyanto & Riris Loisa   |         |
| <b>KOMUNIKASI MEDIA DAN PENGARUH @2014</b>   | HAL 105 |
| <b>DINAMIKA BERITA POLITIK MENJELANG PEMILU 2014<br/>(STUDI ANALISIS FRAMING BERITA VERIFIKASI PARTAI<br/>POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2014<br/>DI SURAT KABAR KOMPAS DAN REPUBLIKA)</b> | HAL 107 |
| Dr.Dedeh Fardiah,M.Si.   |         |
| <b>PERSEPSI PEMILIH TERHADAP BERITA KAMPANYE<br/>MELALUI MEDIA CETAK LOKAL<br/>DI SUMATERA BARAT DALAM PILKADA<br/>DI KOTA PADANG TAHUN 2013</b>   | HAL 113 |
| Dr. Asmawi, MS, Yuliandre Darwis Ph.D, Elva Ronaning Roem, M.Si  |         |
| <b>STRATEGI KOMUNIKASI TANGSEL POS DAN<br/>CALON LEGISLATIF DALAM MENGONSTRUKSI<br/>REALITAS SOSIAL ATAS ISU KRUSIAL</b>   | HAL 123 |
| Dr. Armawati Arbi M.Si.  |         |
| <b>TELEVISI DAN INTERNET DALAM KOMUNIKASI<br/>POLITIK PEMILU 2014</b>  | HAL 133 |
| Isnawijayani   |         |
| <b>DIGITALISASI PENYIARAN DI INDONESIA @ 2014 :<br/>PERSOALAN SEKARANG DAN MASA DEPAN</b>  | HAL 141 |
| Rahayu   |         |
| <b>UU RTRI: SOLUSI RRI-TVRI MENYAMBUT PEMILU</b>   | HAL 160 |
| Masduki  |         |
| <b>BEBERAPA CATATAN PENTING TENTANG UU PENYIARAN</b>   | HAL 157 |
| Nina Muthmainnah Armando   |         |

|  |         |
|--|---------|
| <b>MEMPERJUANGKAN HAK PUBLIK :<br/>PELANGGARAN KAMPANYE DI TELEVISI<br/>DAN KETIDAKBERDAYAAN PPI</b><br>Puji Rianto                | HAL 163 |
| <b>DIGITALISASI TELEVISI DI INDONESIA : PELUANG<br/>DAN ANCAMAN TERHADAP DEMOKRASI</b><br>Iwan Awaluddin Yusuf                     | HAL 169 |
| <b>PEMBERITAAN PEMILU 2014 DI MEDIA MASSA :<br/>TINJAUAN ETIKA JURNALISTIK</b><br>Mulharnetti Syas                                 | HAL 176 |
| <b>KEPEMILIKAN MEDIA DAN INDEPENSI WARTAWAN</b><br>Turnomo Raharjo   | HAL 185 |
| <b>KEPEMILIKAN MEDIA DAN URGENSI JURNALISME DAMAI</b><br>Farid Rusdi,S.Si.,M.Si  | HAL 191 |
| <b>PERUBAHAN KONSEP BISNIS MEDIA DI INDONESIA</b><br>Yuli Nugraheni S.Sos., M.Msi, Finsensius Yuli Purnama S.Sos., M.Med.Kom       | HAL 198 |
| <b>KEPEMILIKAN MEDIA DAN PENCITRAAN<br/>KANDIDAT PEMILU PRESIDEN 2014</b><br>Sevly Eka Putri                                       | HAL 203 |
| <b>TELEVISI DAN POPULARITAS POLITISI</b><br>Rahmat Edi Irawan, S.Pd, M.IKom  | HAL 214 |
| <b>PENCITRAAN MELALUI MEDIA DAN ELEKTABILITAS<br/>PARTAI POLITIK</b><br>GUNTUR WIDIANTO, NUR AFIFAH PUTRI                          | HAL 219 |
| <b>MANAJEMEN PARTISIPATIF RADIO KOMUNITAS DI DAERAH<br/>PANTURA JAWA BARAT</b><br>Mochamad Rochim, Nova Yuliaty, dan Dede Lilis Ch | HAL 225 |
| <b>FAKTOR PENYEBAB PEMILIHAN DAN PENOLAKAN<br/>IKLAN POLITIK</b><br>Inge Hutagalung  | HAL 232 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>PILIHAN PARTAI DAN PILIHAN RAKYAT<br/>(MENAKAR KOMUNIKASI POLITIK DAN<br/>PELUANG KETERPILIHAN CALON MELALUI IKLAN<br/>DAN KAMPANYE POLITIK DALAM PEMILU LEGISLATIF<br/>DAN PEMILU PRESIDEN 2014)</b><br>Dr Lely Arrianiem, M.Si | HAL 240 |
| <b>KAMPANYE TERSELEBUNG (KAJIAN TENTANG KUIS<br/>KEBANGSAAN DI RCTI).</b><br>Anang Masduki  | HAL 246 |
| <b>SPEECH ACT DALAM INKONSISTENSI IKLAN KAMPANYE<br/>ABURIZAL BAKRIE VERSI PEDAGANG KECIL</b><br>Endah Purwitasari & Irma Erviana   | HAL 252 |
| <b>MEMBANGUN LITERASI IKLAN POLITIK<br/>BAGI PEMILIH CERDAS</b><br>Sri Hastjarjo  | HAL 259 |
| <b>PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN<br/>ELEKTABILITAS INCUMBENT</b><br>Yesi Puspita, M.Si, Revi Marta, M.I.Kom, Yayuk Lestari, MA   | HAL 266 |
| <b>MEDIA BARU SEBAGAI KANAL DEMOKRATISASI</b><br>Sugeng Wahjudi   | HAL 273 |
| <b>MEDIA ONLINE DAN KOMUNIKASI POLITIK<br/>TINJAUAN TEORI<br/>COMPUTER-MEDIATED-COMMUNICATION<br/>(CMC) MELALUI MEDIA BARU MENUJU KEPENTINGAN<br/>PEMILU 2014</b><br>Lisa Adhrianti, S.Sos, M.Si                                    | HAL 280 |
| <b>KEKUATAN MEDIA MASSA DALAM KOMUNIKASI POLITIK :<br/>INTERNET SEBAGAI SEBUAH ALTERNATIF</b><br>Yasir  | HAL 286 |
| <b>NEW MEDIA :<br/>POLITICAL PUBLIC RELATIONS &amp; POLITICAL<br/>MARKETING PADA PEMILU 2014</b><br>Dr Effy Rusfian   | HAL 294 |

|  |         |
|--|---------|
| <b>INTERNET DAN DEMOKRASI :<br/>NEW MEDIA SEBAGAI PENINGKAT<br/>PARTISIPASI POLITIK</b><br>Dani Fadillah   | HAL 301 |
| <b>PERAN SOSIAL MEDIA DALAM MENDORONG PEMUDA<br/>UNTUK BERPARTISIPASI PADA PEMILU 2014</b><br>Imam Nuraryo   | HAL 306 |
| <b>TEKNOLOGI PERSUASI : MEREBut SUARA REMAJA<br/>DI MEDIA SOSIAL</b><br>Rino F Boer  | HAL 313 |
| <b>POTENSI MEDIA WEB 2.0 DALAM MENINGKATKAN<br/>PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2014</b><br>Rustono Farady Marta, S.Sos., M.Med.Kom.                                     | HAL 319 |
| <b>ANALISIS KOMUNIKASI MEDIA BARU (SOCIAL MEDIA)<br/>WIN-HT MENUJU PEMILIHAN PRESIDEN DAN<br/>WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014</b><br>Rahma Santhi Zinaida, S.Si., M.I.Kom      | HAL 330 |
| <b>MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA BRANDING POLITISI<br/>(STUDI TERHADAP AKUN MEDIA SOSIAL<br/>PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO)</b><br>Faridian Anshari & Mahendra Prastya | HAL 337 |
| <b>BERWACANA DI RUANG PUBLIK VIRTUAL</b><br>Rulli Nasrullah  | HAL 348 |
| <b>STRATEGI PRESENTASI DIRI CALON PRESIDEN 2014 DI<br/>MEDIA SOSIAL TWITTER</b><br>Endah Murwani & Joice Carol Siagian   | HAL 359 |
| <b>MENAKAR KEKUATAN PESAN CALON KANDIDAT<br/>PRESIDEN 2014 MELALUI MEDIA SOSIAL</b><br>Martriana PS, M.Si & Andina Ayu, M.Si   | HAL 369 |
| <b>TWITTER, RUANG REDAKSI, DAN PEMILU 2014</b><br>Aryo Subarkah Eddyono, M.Si  | HAL 377 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>PEMBINGKAIAN ISU JOKO WIDODO SEBAGAI<br/>CALON PRESIDEN PADA KOMPAS ONLINE</b><br>Ramita Hapsari & Reni Fitriani                                   | HAL 383 |
| <b>KOMUNIKASI DAN PENDAPAT UMUM @2014</b>   | HAL 391 |
| <b>MEDIA MASSA, PENGUASA OPINI PUBLIK DALAM<br/>ISU POLITIK</b><br>Sugihandari  | HAL 393 |
| <b>SIMBOL-SIMBOL BUDAYA DI RUANG PUBLIK KAMPANYE<br/>PILCALEG DI KOTA BAU-BAU</b><br>M.Najib Husain   | HAL 400 |
| <b>KOMUNIKASI PEMASARAN SOSIAL KPU DALAM RANGKA<br/>SOSIALISASI BAGI PEMILIH PEMULA MENGHADAPI<br/>PEMILU 2014</b><br>nieke monika kulsum, s.e., m.sl | HAL 407 |
| <b>SELF FULFILLING PROPECHY DALAM JURNALISME<br/>BAGI ELEKTABILITAS KANDIDAT POLITIK</b><br>Wahyuni Choiriyati  | HAL 414 |
| <b>POLITIC AWARENESS PEMILIH PEMULA PEMILU 2014</b><br>Eni Maryani  | HAL 421 |
| <b>@KOMUNIKASI 2014 : DIMANA RUANG BAGI AUDIENCE ?</b><br>Ignatius Haryanto   | HAL 430 |
| <b>PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PERAN<br/>DAN FUNGSI ANGGOTA DPR RI TAHUN 2009-2014</b><br>Harmonis, Octaviana Purnamasari, Sa'diyah El Adawiyah          | HAL 434 |
| <b>KAMPANYE DAN KOMUNIKASI POLITIK<br/>DALAM PEMILU MELALUI TELEVISI</b><br>Dicky Andika, M.Si  | HAL 446 |

|  |         |
|--|---------|
| <b>KOMUNIKASI DAN ISU KRUSIAL @2104</b>  | HAL 455 |
| <b>KETIKA MEDIA MELENYAPKAN EKSISTENSI WANITA</b><br>Sunarto   | HAL 457 |
| <b>KESETARAAN GENDER DAN PENINGKATAN<br/>PARTISIPASI PEREMPUAN<br/>DALAM PRODUKSI PROGRAM TELEVISI</b><br>Fitria Angeliqa & Cici Eka Iswahyuningtyas     | HAL 465 |
| <b>PERJUANGAN POLITIK PEREMPUAN DAN PELUANG<br/>CALEG PEREMPUAN DALAM PEMBERITAAN KORUPSI</b><br>Hadiati, Irwan Abdullah dan Wening Udasmoro             | HAL 473 |
| <b>GAMBARAN TOKOH PEREMPUAN DALAM KASUS KORUPSI<br/>DI MEDIA MASSA</b><br>Suzy Azeharie  | HAL 480 |
| <b>HUBUNGAN SALING MENGUNCI SEBAGAI BENTUK<br/>KOMUNIKASI KORUPSI</b><br>Antoni  | HAL 485 |
| <b>KOMPLEKSITAS PEMBERITAAN TENTANG KORUPSI<br/>DI MEDIA INDONESIA : STUDI KASUS GAYUS TAMBUNAN</b><br>Sumarni Bayu Anita, S.Sos, M.A                    | HAL 494 |
| <b>OTOKRITIK TERHADAP MEDIA TELEVISI SEBAGAI SUMBER<br/>INFORMASI TENTANG KORUPSI</b><br>Umaimah Wahid, Ni Gusti Ayu Ketut Kurniasari                    | HAL 501 |
| <b>STRATEGI KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU<br/>KAMPANYE ANTI KORUPSI KOMISI PEMBERANTASAN<br/>KORUPSI INDONESIA</b><br>Rosidah, Amia Luthfia, Wira Respati | HAL 509 |
| <b>PEMILU 2014 DAN KRISIS KOMUNIKASI<br/>KELOMPOK MINORITAS</b><br>Uwes Fatoni   | HAL 521 |
| <b>EGALITARIANISME ETNISITAS<br/>DALAM KURSI KEPRESIDENAN</b><br>Nina Widyawati  | HAL 529 |

|   |         |
|---|---------|
| <b>LUNTURNYA DISKRIMINASI DALAM MEDIA :<br/>CITRA AHOK DALAM PEMBERITAAN MEDIA</b>  | HAL 538 |
| Theresia Intan  |         |
| <b>POTRET TIONGHOA DI MEDIA MASSA INDONESIA</b>                                     | HAL 545 |
| Eriyanti Nurmala Dewi   |         |
| <b>DINAMIKA KOMUNIKASI DAN BUDAYA TRANSPARANSI<br/>PARTAI POLITIK : KASUS PKS</b>   | HAL 551 |
| O. Hasbiansyah, Ema Khotimah, Dadi Ahmadi, dan Erik Setiawan                        |         |
| <b>PROFESIONAL KOMUNIKASI DALAM<br/>DEMOKRASI MINIMALIS</b>                         | HAL 558 |
| Triyono Lukmantoro  |         |
| <b>MEWASPADAI KOMODITAS POLITIK PEMILIK MEDIA<br/>PRA PEMILU 2014</b>               | HAL 569 |
| Gushevinalti  |         |
| <b>IMPLIKASI CONTENT PROVIDER PADA<br/>TELEVISI BERJARINGAN</b>                     | HAL 575 |
| Hedi Pudjo Santosa  |         |
| <b>MEDIA MASSA, KETERBUKAAN INFORMASI<br/>DAN KEKUASAAN NEGARA</b>                  | HAL 583 |
| Eko Harry Susanto   |         |
| <b>PEMILU 2014 DAN APATISME PEMILIH</b>   | HAL 591 |
| Karim Suryadi   |         |
| <b>PERAN KONSTRUKTIF MEDIA DALAM MEMBANGUN<br/>KOMUNIKASI POLITIK YANG BERETIKA</b> | HAL 599 |
| Eki Baihaki   |         |
| <b>KEBEBASAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI INDONESIA<br/>MENJELANG PEMILU 2014</b>    | HAL 604 |
| Kusumajanti   |         |
| <b>MEDIA MASSA LOKAL DAN ISU KONTROVERSIAL :<br/>SEBUAH KAJIAN MORFOGENESIS</b>     | HAL 612 |
| Mulyanti Syas   |         |

|  |         |
|--|---------|
| <b>PERAN MEDIA SEBAGAI BAGIAN EARLY WARNING SYSTEM<br/>DALAM PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL</b>             | HAL 620 |
| Yohanes Krisnawan  |         |
| <b>ETIKA DAN MORAL : PERTARUHAN DAN PERGULATAN<br/>POLITIK CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 20144</b>      | HAL 626 |
| Aziz Taufik Hirzi  |         |
| <b>ROKOK MEMBELAH INDONESIA<br/>REGULASI KOMPREHENSIF TERHADAP<br/>ROKOK AMAT KRUSIAL</b>              | HAL 632 |
| Irwan Julianto   |         |
| <b>KOMUNIKASI DAN DINAMIKA SOSIAL</b>  | HAL 641 |
| <b>PERAN NORMA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN<br/><i>SOCIAL CAPITAL</i></b>                                  | HAL 643 |
| Reza Safitri, Hasmah Zanuddin  |         |
| <b>PENGETAHUAN ORANG TUA MENGENAI MEDIA SOSIAL<br/>YANG DIGUNAKAN REMAJA</b>                           | HAL 653 |
| Damayanti Wardyaningrum  |         |
| <b>PEMANFAATAN MEDIA MASSA DI PESANTREN<br/>MODERN (<i>ISLAMIC BOARDING SCHOOL</i>) DI JAWA BARAT</b>  | HAL 660 |
| Gumgum Gumilar   |         |
| <b>WEBSITE SEBAGAI MEDIA PROMOSI PARIWISATA</b>  | HAL 667 |
| Choirul Fajri  |         |
| <b>OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DENGAN PENGGUNAAN<br/>TEKNOLOGI INFORMASI MENUJU <i>CYBERCITY</i></b> | HAL 673 |
| Dra. Lidya Wati Evelina, MM.   |         |
| <b>PENGARUH <i>NEW MEDIA</i> TERHADAP PERKEMBANGAN<br/><i>CYBER SOCIETY</i></b>                        | HAL 681 |
| Rahmadya Putra Nugraha   |         |



|   |         |
|---|---------|
| <b>PERSEPSI REMAJA TERHADAP AGENDA<br/>MEDIA PROGRAM “BROWNIES” PARTA PORTE TRANS7</b>  | HAL 687 |
| Elsya Wulandari, S. Ikom & Risma Kartika, M.Si  |         |
| <b>BAHASA VISUAL KARTUN EDITORIAL</b>   | HAL 694 |
| Noval Sufriyanto Talani, S.Sn, M.Ds, M.Si   |         |
| <b>MEDIA CETAK BERTAHAN HIDUP STRATEGI JAWA POS<br/>INDONESIA DAN THE STRAITS TIMES SINGAPURA<br/>MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA<br/>DARI GEMPURAN MEDIA ONLINE</b> | HAL 702 |
| Irwan Setyawan  |         |
| <b>BAGAIMANA MENCIPTAKAN WARTAWAN INVESTIGASI ?<br/>STUDI KUALITATIF PADA PERKEMBANGAN<br/>KONSEP DIRI WARTAWAN INVESTIGASI DI INDONESIA</b>                      | HAL 712 |
| Hasyim Widhi Arto Arum Dhita Abdul Karim  |         |
| <b>NILAI-NILAI SOSIAL DALAM TAYANGAN HUMOR<br/>DI TELEVISI INDONESIA</b>  | HAL 723 |
| Rendra Widyatama  |         |
| <b>KONVERGENSI KOMUNIKASI BIROKRASI :<br/>INTERNAL BERBENAH, EKSTERNAL TUNTUT KETERBUKAAN</b>   | HAL 735 |
| Dorien Kartikawangi   |         |
| <b>OPTIMALISASI PERAN DAN FUNGSI HUMAS<br/>PEMERINTAHAN UNTUK MENINGKATKAN<br/>PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN<br/>DI JAWA BARAT.</b>                    | HAL 743 |
| Diah Fatma Sjoraida, Ilham Gemiharto  |         |
| <b>PENINGKATAN KOMPETENSI PROFESI PUBLIC RELATIONS</b>  | HAL 752 |
| Dr. Felix Jebarus   |         |
| <b>MENGINISIASI NATION BRANDING INDONESIA<br/>MENUJU DAYA SAING BANGSA<br/>(PERSPEKTIF MAHASISWA INTERNASIONAL INDONESIA)</b>                                     | HAL 759 |
| Dr. Irwansyah, MA   |         |

|   |         |
|---|---------|
| <b>PENTINGNYA KEMAMPUAN NEGOSIASI BISNIS DALAM<br/>MEMASARKAN PRODUK DAN JASA</b><br>Yusuf Hamdan, Anne Ratnasari, Aziz Taufik Hirzi  | HAL 772 |
| <b>REVITALISASI POSYANDU DALAM PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DI JAWA BARAT</b><br>Ilham Gemiharto, Diah Fatma Sjoraida  | HAL 780 |
| <b>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COMMUNITY DEVELOPMENT<br/>PADA INDUSTRI DAN LEMBAGA DI JAWA BARAT<br/>SUATU STUDI KUANTITATIF DENGANN MENGGUNAKAN<br/>TEKNIK ANALISIS JALUR</b><br>Suwandi Sumartias, Evi Novianti, Kokom Komariah, dan Aat R. Nugraha                              | HAL 789 |
| <b>KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI DALAM MEMBANGUN<br/>SUASANA BELAJAR DI SEKOLAH INKLUSIF</b><br>Ike Junita Triwardhani   | HAL 799 |
| <b>PENCARIAN INFORMASI KESEHATAN BERBASIS TANAMAN<br/>OBAT KELUARGA MELALUI SALURAN KOMUNIKASI<br/>INTERPERSONAL DI PROVINSI JAWA BARAT</b><br>Dr. Iriana Bakti, M.Si, Dr. Evie Ariadne Shinta Dewi, M.Pd.,<br>Drs. Rosnandar Romli, M.Si., Heru Ryanto Budiana, S.Ag., M.Si. | HAL 806 |
| <b>STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN<br/>RRI PADANG PRO 1 FM 97.5 MHZ</b><br>Elva Ronaning Roem, Yuliandre Darwis, Lisa Oktaviana   | HAL 813 |
| <b>IDEOLOGI DALAM JURNALISME ANTARBUDAYA</b><br>Kiki Zakiah   | HAL 822 |
| <b>SEMIOTIKA PENELITIAN ILMIAH DOSEN</b><br>Dominiq Tulasi  | HAL 833 |

# PEMILU 2014 DAN KRISIS KOMUNIKASI KELOMPOK MINORITAS

Uwes Fatoni

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
kanguwes@uinsgd.ac.id

## ABSTRAK

Indonesia sebagai negara multikultural tahun 2014 masih menghadapi banyak permasalahan kebangsaan salah satu diantaranya adalah krisis komunikasi terhadap kelompok minoritas. Berbagai hasil penelitian dari Kontras, Setara *Institute*, *Center For Religious And Cross-cultural Studies* (CRCS) maupun *the Wahid Institute* mengungkapkan, setiap tahun peristiwa intoleransi terhadap kaum minoritas terus meningkat. Dalam aturan perundang-undangan, Indonesia memberikan jaminan kebebasan beragama sebagaimana tercermin dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan Pasal 28 E Amandemen UUD 1945, serta diperjelas pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pada 23 Februari 2006 Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) tentang perlindungan terhadap hak-hak minoritas. Namun di sisi lain ada perundang-undangan yang dianggap menjadi dasar sikap diskriminatif terhadap agama minoritas seperti UU No. 1/PNPS/1965, SKB No. 1/79, Peraturan Bersama Nomor 9 dan 8/2006 dan SKB No. 3/2008. Kondisi ini melahirkan krisis komunikasi kebangsaan yang perlu diselesaikan tidak hanya dengan sikap apologis pemerintah (*Corporate Apologia*), tapi juga harus melalui komunikasi solutif seperti penggunaan komunikasi krisis model lima tahap dari Mitroff (Coombs dan Holladay, 2010). Pemilu 2014 diharapkan menjadi momentum menuju Indonesia ramah beragama.

Kata Kunci : kelompok minoritas, krisis komunikasi, *corporate apologia*, komunikasi solutif, model lima tahap Mitroff

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multikultural dengan beragam etnis, budaya dan agama. Sejak kemerdekaan negara ini telah mengakui keberagaman komponen bangsa karena didirikan untuk kepentingan semua golongan. Indonesia tidak didirikan untuk kepentingan kelompok mayoritas, tidak juga untuk kepentingan kelompok minoritas. Indonesia oleh para pendiri bangsa diharapkan bisa menjadi *melting pot* (tempat berkumpulnya) beragam kelompok masyarakat yang berbeda agama, suku, dan bahasa. Kondisi multikultural tersebut melalui pengelolaan yang baik menjadi keunggulan Indonesia dari negara-negara lain di dunia.

Di sisi lain, kondisi multikultural juga memiliki kelemahan. Bila tidak dijaga, kondisi tersebut bisa menciptakan konflik sosial, misalnya pemaksaan kehendak oleh kelompok-kelompok ekstrimis atau militan yang memiliki agenda tertentu sehingga mengebiri kepentingan kelompok lain. Kelompok militan tersebut bisa berasal dari kelompok mayoritas (*dictator majority*), dan bisa juga dari kelompok minoritas (*tirany minority*). Menurut Andreas Harsono (2013) militansi kelompok pada zaman Soekarno dan Soeharto tidak bisa berkembang karena sikap otoriter lebih mengemuka dalam kebijakan politik. Keadaan berbeda terjadi sesudah Soeharto mundur dari kekuasaan dan ruang politik terbuka lebih lebar pada masa reformasi.

Di masa reformasi konflik sosial mudah meledak menjadi konflik komunal dengan isu mengenai etnisitas dan agama menempati porsi terbesar. Menurut Amin Mudzakir (2007: 126) isu etnisitas mulai menemukan kanalisasinya melalui ajang kontestasi politik lokal yang semakin ekspresif pasca pemberlakuan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Beberapa daerah yang sebelumnya ingin memisahkan diri dari NKRI mengendurkan niatnya karena diberikan peluang untuk masuk dalam kekuasaan melalui ajang pemilihan umum kepala daerah. Kondisi ini misalnya terjadi di Aceh dan Papua. Hal yang berbeda terjadi dalam isu agama. Sampai sekarang, kanalisasi untuk isu ini belum ditemukan, atau kalau pun ada, belum cukup meyakinkan. Arus demokratisasi yang berlangsung intensif pasca Soeharto belum mampu menciptakan sebuah sistem kenegaraan yang mampu mengakomodasi dan memediasi berbagai perbedaan afiliasi agama. Sebaliknya sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama dengan korban berasal dari kelompok-kelompok keagamaan minoritas seperti Ahmadiyah, Syi'ah dan Kristen. Konflik-konflik ini merupakan bentuk krisis komunikasi kebangsaan yang perlu segera ditemukan solusinya, sehingga Indonesia tidak terus berada dalam sorotan tajam negara-negara lain sebagai negara yang banyak melanggar HAM. Pemerintah sebagai lembaga yang mengayomi kepentingan masyarakat dituntut memiliki *political will* untuk memecahkan krisis komunikasi tersebut. Solusi politik dari pemerintah yang berkuasa dalam menyelesaikan konflik-konflik tersebut tidak cukup sekedar basa-basi (*lips service*) atau pencitraan saja, namun harus betul-betul solusi komprehensif sehingga di masa depan konflik yang sama tidak kembali muncul.

Pemilu seringkali diidentikan dengan pengumpulan suara terbanyak dari pemilih (*voters*). Karena itu isu yang diusung dalam tema-tema kampanye seringkali lebih berpihak pada kelompok mayoritas dan jarang menyinggung kepentingan kelompok mayoritas. Hal ini di satu sisi menjadi hal yang lumrah karena penentuan pemenang dalam pemilu hanya dihitung berdasarkan suara terbanyak. Namun, bila jumlah suara menjadi satu-satunya patokan yang menjadi *concern* para calon pemimpin negeri, maka bisa dipastikan bangsa ini akan terus-menerus menjadi sorotan lembaga-lembaga HAM dunia.

## PEMBAHASAN

Tatkala Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono meraih penghargaan negarawan dunia (*World Stateman Award*) 2013 dari *Appeal of Conscience Foundation* (ACF), muncul penentangan dan protes dari beberapa kalangan. Salah satu yang keras menolak adalah Franz Magnis Suseno. Alasannya, kualitas toleransi di Indonesia selama hampir 10 tahun terakhir justru dalam kondisi menurun. Baginya pemberian penghargaan tersebut kontra produktif dengan misi ACF sebagai lembaga yang mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi dan dialog antarkepercayaan. Pemberian penghargaan itu akan membuat malu lembaga tersebut karena banyak peristiwa intoleransi yang terjadi di Indonesia selama masa kepemimpinan SBY (Gatra, 2013).

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Kontras, *Setara Institute*, *Center For Religious And Cross-cultural Studies* (CRCS) UGM maupun *the Wahid Institute* yang mengungkapkan, setiap tahun peristiwa intoleransi terhadap kaum minoritas terus meningkat, seperti penyerangan, pembakaran dan penutupan rumah ibadah kelompok minoritas Ahmadiyah dan Syiah, juga pelarangan pendirian gereja, serta diskriminasi dalam pengurusan administrasi negara bagi penganut agama-agama leluhur semacam Sunda Wiwitan.

Kontras mensinyalir kelompok minoritas senantiasa menjadi korban diskriminasi. Hal ini telah lama menjadi sinyalemen Kymlicka (2000: 195), nasib kaum minoritas pada abad sekarang sedang dirongrong, bahkan sebagian berada dalam genggaman kaum ekstrimis yang benci pada perbedaan. Negara, lewat aparat keamanan oleh Kontras juga dituduh menjadi pelindung kelompok mayoritas ekstrimis yang intoleransi (Kontras, 2013: 5). Sementara itu Setara institute mengungkapkan, selama enam tahun terakhir (2007-2012) di Indonesia terjadi 3123 kasus diskriminasi dan kekerasan berlandaskan agama dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 1**

### Peristiwa dan Tindakan kekerasan berlandaskan agama

| No.   | Tahun | Peristiwa | Tindakan | Jumlah |
|-------|-------|-----------|----------|--------|
| 1     | 2007  | 135       | 185      | 320    |
| 2     | 2008  | 265       | 367      | 632    |
| 3     | 2009  | 200       | 291      | 491    |
| 4     | 2010  | 216       | 286      | 502    |
| 5     | 2011  | 244       | 299      | 543    |
| 6     | 2012  | 264       | 371      | 635    |
| TOTAL |       |           |          | 3123   |

Dari semua peristiwa diskriminasi dan kekerasan tersebut terdapat beberapa kasus besar yang menjadi pemberitaan media nasional dan internasional diantaranya: penghentian kegiatan pembangunan dan kegiatan ibadah di gereja HKBP Filadelfia Bekasi dan GKI Yasmin Bogor, penyerangan kepada kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Banten 6 Februari 2011 yang mengakibatkan tiga orang tewas dan lima lainnya mengalami luka parah, dan penyerangan kampung Syiah di Sampang, Madura, pada tanggal 20 Agustus 2012. Berbagai kasus tersebut tidak mampu diselesaikan melalui jalur hukum.

Dalam kasus Gereja HKBP Filadelfia misalnya, PTUN Bandung dan PTUN Jakarta mengabulkan gugatan Gereja HKBP Filadelfia serta Mahkamah Agung menolak kasasi Bupati Bekasi. Demikian juga MA memutuskan meminta Bupati Bogor untuk membuka bangunan gereja yang disegel. Namun, keputusan MA tersebut tidak pernah dilaksanakan di lapangan. Hal yang sama juga

terjadi pada kasus penyerangan kepada Ahmadiyah di Cikeusik. Pengadilan menjatuhkan hukuman kurungan selama tiga hingga enam bulan bagi 12 pelaku. Namun, keputusan ini oleh beberapa kalangan pembela HAM dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan.

Berbagai peristiwa tersebut menjadi *warning* bagi legitimasi pemerintah, sekaligus mencerminkan bahwa negara ini mengalami krisis komunikasi. Fearn-Banks (2011: 2) menyebut, krisis adalah peristiwa penting yang berpotensi membawa pengaruh negatif bagi organisasi dan terkadang dapat mengancam eksistensi organisasi. Negara sebagai organisasi yang memayungi masyarakat terancam eksistensinya oleh berbagai peristiwa negatif tersebut. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan membuat aturan perundang-undangan justru melahirkan krisis baru, karena aturan tersebut dikritisi bahkan ditentang oleh kelompok-kelompok minoritas yang merasa kepentingannya terancam. Otto Lerbinger (Ruff dan Aziz, 2003: 5) mengungkapkan, salah satu peristiwa penting yang menyebabkan terjadinya krisis adalah adanya konfrontasi atau perlawanan dari kelompok lain. Aturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan jaminan tentang kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam pasal 29 ayat 2, UUD 1945, dan pasal 28E amandemen UUD 1945. Aturan ini diperjelas melalui Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Untuk memperkuat jaminan kebebasan beragama lebih khusus lagi perlindungan terhadap hak-hak minoritas pada 23 Februari 2006 Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) khususnya Pasal 27 yang menyatakan: “Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan sukubangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”

Namun, di segi lain ada beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia yang dipermasalahkan karena menjadi dasar sikap diskriminatif terhadap agama-agama minoritas (Alfitri, 2008; Burhani, 2012; Crouch, 2012). Beberapa aturan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Human Right Watch (2013) diantaranya :

UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/79 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;

Peraturan Bersama Menteri Agama (Nomor 9) dan Menteri Dalam Negeri (Nomor 8) Tahun 2006 Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri (No. 3/2008) yang mengatur Ahmadiyah untuk “menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan keagamaan.”

Komunikasi krisis didefinisikan oleh Coombs (20) sebagai “*the collection, processing, and dissemination of information required to address a crisis situation*” berdasarkan definisi ini dalam upaya menyelesaikan krisis diperlukan proses pengumpulan, pengelolaan dan penyebaran informasi yang dibutuhkan dalam mengatasinya. Dengan kata lain, komunikasi krisis sama dengan manajemen krisis yaitu pengelolaan yang dilakukan berkaitan dengan terjadinya sebuah peristiwa krisis.

Menurut Fearn-Banks (2011), kegiatan komunikasi pada saat krisis menjadi sangat penting disebabkan antara lain karena adanya ketidakpastian (*uncertainty*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), kompleksitas dan keterlibatan emosional. Untuk mengatasi krisis maka komunikasi menjadi faktor yang sangat penting untuk menghilangkan efek negatifnya.

Pada dasarnya, kelompok masyarakat punya kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sebuah krisis awalnya ditandai dengan kemunculan konflik kepentingan. Dalam situasi krisis, pemerintah harus dapat melayani kepentingan berbagai kelompok masyarakat tersebut dan menyampaikan pesan kepada mereka secara seragam tidak saling bertentangan apalagi memperkeruh suasana. Untuk itu, strategi pesan juga perlu dirancang. Isi komunikasi harus dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda dari berbagai kelompok masyarakat. Menurut Sturges (1994) informasi dalam komunikasi krisis berbentuk tiga informasi, yaitu:

1. *Instructing information*, yakni informasi yang pada dasarnya berisi petunjuk atau pedoman apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika ada sebuah kejadian. Informasi jenis ini penting karena pada saat krisis, anggota masyarakat terutama yang terlibat dalam konflik menginginkan aturan yang pasti bagi mereka untuk melewati masa krisis tersebut.
2. *Adjusting information* adalah informasi yang memungkinkan publik untuk mengatasi masalah-masalah emosional. Misalnya munculnya sikap ketidakpastian atau sikap emosional yang mengarah pada dukungan kepada peristiwa intoleransi tersebut.
3. *Internalizing informations* adalah informasi yang akan diserap masyarakat yang pada akhirnya akan membentuk penilaian masyarakat terhadap pemerintah dalam jangka panjang. Isi komunikasi biasanya menyangkut inti krisis yang sedang dihadapi langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam menangani krisis.

Menurut Ware dan Linkugel (dalam Coombs dan Holladay, 2010: 30) komunikasi krisis biasanya diawali dengan sikap apologis institusi (*Corporate apologia*). Ini artinya pemerintah mengeksplorasi penggunaan komunikasi untuk pertahanan diri. Dalam berbagai kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia, pemerintah sering menanggapi dengan menolak tuduhan terlibat dalam tindakan diskriminatif tersebut. Untuk itu dengan menggunakan analisis dari Ware dan Linkugel bisa dilihat ada empat strategi pemerintah dalam melakukan pertahanan diri, yaitu :

Penyangkalan (*denial*), pemerintah menyatakan tidak terlibat dalam melakukan kesalahan. Ini misalnya respon pemerintah SBY ketika *Human Right Watch* menuduh pemerintah melakukan diskriminasi dan intoleransi, dengan segera juru bicara kepresidenan membantah hal tersebut.

Memperkuat (*Bolstring*) atau mengingatkan masyarakat pada hal-hal baik yang telah dilakukan pemerintah. Contohnya penolakan pemberian penghargaan kepada SBY karena dianggap intoleransi, dibalas SBY dengan menyebutkan hal-hal positif berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia

Pembedaan (*differentiation*) menghapus tindakan dari konteks negatif. Misalnya pembenaran terhadap kasus penyerangan terhadap kegiatan Ahmadiyah dengan dalih kegiatan tersebut itu sudah dilarang dalam SKB tiga menteri. Selain itu Ahmadiyah juga dianggap tidak akomodatif dengan aparat keamanan yang memintan menghentikan kegiatannya.

Transendensi (*transcendence*) yaitu menunjukkan aksi baru atau konteks yang lebih luas yang lebih menguntungkan. Dalam hal ini misalnya dilakukan oleh SBY yang menyatakan bahwa keberhasilan ekonomi Indonesia yang di atas rata-rata mencerminkan keberhasilan pembangunan pada masa pemerintahannya.

Berbagai strategi komunikasi yang bersifat apologis itu tentu saja tidak akan menyelesaikan inti masalah. Dalam komunikasi krisis masalah tidak bisa diselesaikan paska sebuah peristiwa terjadi, tapi harus diantisipasi sebelum peristiwa itu meledak. Salah satu alternatif komunikasi solusi yaitu model lima tahap dari Mitroff (Coombs dan Holladay, 2010: 22), yakni:

1. *Signal detection* atau deteksi sinyal. Tahap ini dilakukan dengan berusaha mengidentifikasi tanda-tanda akan terjadi kejadian dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Pemerintah perlu mendorong kepolisian sebagai aparat keamanan untuk mendeteksi setiap tanda-tanda akan terjadinya peristiwa diskriminasi atau intoleransi. Sebagai organisasi modern tentu kepolisian memiliki sumber daya manusia yang mumpuni seperti memaksimalkan lembaga intelejen negara (BIN) atau satuan intel kepolisian.
2. *Probing and prevention*, yaitu memeriksa dan mencegah. Tahapan ini bisa dilakukan dengan mengkaji dan meneliti secara aktif setiap peristiwa yang riskan melahirkan tindak intoleransi. Dengan pemeriksaan dan pencegahan maka resiko yang lebih besar akan mudah dieliminir.
3. *Damage containment*, menahan kerusakan agar tidak menyebar. Tatkala sebuah peristiwa intoleransi terjadi maka diupayakan akses dari peristiwa tersebut dibatasi sehingga tidak menyebar ke daerah lain atau berulang di waktu yang lain.
4. *Recovery*, pemulihan, yaitu usaha untuk mengembalikan kehidupan masyarakat yang mengalami intoleransi atau mempertemukan pelaku intoleransi dengan korban agar mereka bisa kembali hidup normal. Upaya ini tidak bisa dilakukan kecuali posisi pemerintah berada di tengah-tengah kelompok yang konflik.
5. *Learning*, proses belajar, tahap untuk mengkaji upaya-upaya manajemen krisis dan belajar agar peristiwa tersebut tidak terulangi lagi di waktu yang akan datang. Bila pemerintah melakukan upaya *learning* ini, maka tidak akan muncul laporan peristiwa intoleransi terus bertambah setiap tahun. Bisa dipastikan peristiwa pada tahun berikutnya merupakan kelanjutan dari peristiwa yang terjadi pada tahun sebelumnya yang tidak terselesaikan.

## PENUTUP

Bangsa Indonesia masih dalam proses belajar berdemokrasi setelah dua periode sebelumnya berada dalam masa pengekangan dan pemerintahan yang represif. Dalam proses belajar ini tentu dinamika kehidupan sosial belum mencapai tahap sempurna. Penghargaan kepada kelompok minoritas yang diakui dalam UUD 1945 dan amandemennya tentu perlu terus dijaga. Disisi lain, upaya untuk mendorong agar masyarakat semakin peka dengan masalah intoleransi dan diskriminasi perlu terus digalakkan sehingga tidak ada lagi upaya memaksakan kehendak apalagi disertai dengan kekerasan dari salah satu kelompok masyarakat kepada kelompok yang lain karena ingin memperjuangkan aspirasinya. Saluran terlembaga resmi negara yaitu pengadilan harus menjadi pengawal penegakan hukum. Selain itu, saluran komunikasi dan dialog perlu terus dibuka di antara kelompok-kelompok masyarakat agar menjadi katarsis bagi kemunculan sikap-sikap intoleransi. Pemerintah perlu mengapresiasi setiap kepentingan dan keinginan dari berbagai kelompok, namun tetap harus dalam posisi netral, berada di tengah-tengah, dan menjadi pengayom semua kelompok. Upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai konflik keagamaan perlu diapresiasi, namun tentu juga tidak harus kebal dari kritik. Upaya perbaikan yang terus menerus menjadi hal yang wajib untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa.



Untuk menciptakan Indonesia yang ramah beragama menurut Human Right Watch (2013) pendekatan paling sederhana adalah melalui sikap *zero tolerance* terhadap semua pelaku kekerasan atas nama agama. Ini mensyaratkan polisi, jaksa, hakim dan semua aparat pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah wajib menegakkan hukum. Di sisi lain, saluran komunikasi antara berbagai kelompok masyarakat harus terbuka dengan baik dan tidak terhambat. Dengan proses komunikasi yang terbuka, berbagai kepentingan kelompok masyarakat akan mudah tersalurkan dan suaranya turut diperhatikan dalam proses pembuatan keputusan politik.

Pemilu 2014 diharapkan bisa melahirkan para pemimpin bangsa yang mampu mengayomi kelompok mayoritas dan menghargai eksistensi kelompok minoritas. Pemilu 2014 menjadi gerbang bagi pemerintahan yang lebih baik, pemerintahan yang bukan saja terpilih melalui proses demokrasi yang prosedural tapi juga bisa mewujudkan menjadi proses demokrasi yang substansial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri, (2008). Religious Liberty in Indonesia and the Rights of “Deviant” Sects”. *Asian Journal of Comparative Law*, 3(1), 1-27.
- Burhani, Najib, (2012). Tiga Problem Dasar dalam Perlindungan Agama-agama Minoritas di Indonesia. *MAARIF*, 7(1), 43-55.
- Coombs, W. Timothy, & Holladay, Sherry J. (2010). *The Handbook of Crisis Communication*. Malden: Blackwell Publishing Ltd.
- Crouch, Melissa. (2012). Judicial Review and Religious Freedom: The Case of Indonesian Ahmadis. *Sydney Law Review*, 34(3), 545-572.
- Fearn-Banks, Kathleen. (2011). *Crisis Communications, A Casebook Approach, Fourth Edition*. New York: Routledge.
- Gatra, Sandro. (2013). Surat Protes Franz Magnis atas Rencana Penghargaan Negarawan untuk SBY. <http://nasional.kompas.com/read/2013/05/17/11000272/Surat.Protes.Franz.Magnis.atas.Rencana.Penghargaan.Negarawan.untuk.SBY> (diakses tanggal: 5 Oktober 2013).
- Harsono, Andreas. (2013). Mengapa Marak Kekerasan Atas Nama Agama? , <http://www.andreasharsono.net/2013/02/atas-nama-agama.html> (diakses tanggal: 15 Oktober 2013).
- Kymlicka, Will. (2000). *Multicultural Citizenship : a Liberal Theory of Minority Right*. New York: Oxford University Press.
- Mudzakkir, Amin. (2007). *Menjadi Minoritas di Tengah Perubahan : Dinamika Komunitas Ahmadiyah di Ciparay* dalam Mashudi Noorsalim, M. Nurkhourun & Ridwan Al-Makassary (Eds.), *Hak Minoritas, Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa*. Jakarta: Interseksi Foundation, TIFA.
- Ruff, Peter, & Aziz, Khalid. (2003). *Managing Communications in a Crisis*. Hampshire: Gower Publishing Limited.
- Sturges, David L. (1994). Communicating through Crisis : A Strategy for Organizational Survival. *Management Communication Quarterly*, 7(3), 297-316.
- Watch, Human Right. 2013. Atas Nama Agama. <http://www.hrw.org/es/node/113935> (diakses tanggal: 1 Oktober 2013).